



**DAMPAK SOSIAL-BUDAYA PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL
DI PULAU LOMBOK**

Oleh

Mohamad Jumail¹⁾ & Mahsun²⁾

Dosen Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

E-mail: 1thegurujoe@gmail.com & 2mahsun_pariwisata@yahoo.com

Abstract

This paper is attempted to identify social and cultural impacts on halal tourism development in Lombok. There were 11 indicators that employed to measure social impact i.e. religious value on local community; usage of alcoholic drink; youth respect to their parent; social conflict; criminality; value and family togetherness; prostitutions; drugs usage; sexual act; interaction between local and tourists; and willingness of local to learn language. Meanwhile, to measure cultural impacts, 12 indicators were adopted, i.e. craftsmanship; language; traditions; art and music (performance, paintings, sculpture); heritages; type of employment; technology; specific style on architecture; religion and its manifestation; education system; dress; leisure activity. To analyze, synthesize and elaborate the impacts, therefore, social exchange theory (SET) were employed. This theory is relevant to investigate an exchange when interaction occurs between host and guest. It also urged that SET is very valuable to evaluate tourism impacts. Based on the discussion and finding, from 11 indicators of social impacts, 8 of them were incorporate with existing impacts (usage of alcoholic drink; youth respect to their parent; social conflict; criminality; value and family togetherness; prostitution; drugs usage; and sexual act) were came in form of challenge and threats toward halal tourism development in Lombok. Whereas, three impacts that strengthened and supported the halal tourism development i.e. religious values in local community; interaction between host and guest; and willingness of local people to learn the language. In addition, three elements of culture which had been displayed as positive impacts, i.e. heritages, specific style on architecture, and religion and its manifestation. Whereas the others, craftsmanship, language, traditions, art and music, type of employment, technology, education system, dress and leisure activity were become an opportunity and threats in the same context. Finally, this paper suggested that to enhance sustainability of halal tourism development in Lombok, therefore two points, must consider i.e. to socialize massively throughout media and to implement concepts of halal atmospheric.

Key words: impact, social, culture, halal tourism, Lombok Island.

PENDAHULUAN

Keberhasilan pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya destinasi Lombok dalam meraih berbagai penghargaan pariwisata halal pada tiga tahun terakhir patut diapresiasi. Sejak tahun 2015 berbagai penghargaan telah diraih seperti, *The World's Best Halal Tourism Destination* dan *The World's Best Halal Honeymoon Destination* pada acara World Halal Travel Award, Uni Emirate Arab. Tahun 2016, penghargaan bergengsi kembali diraih pada kategori, *World's Best Halal Beach*

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

Resort, Novotel-Lombok sebagai pemenangnya, *World's Best Halal Travel Website*:

www.wonderfullomboksumbawa.com menjadi pemenangnya, dan *World's Best Halal Honeymoon Destination*, Sembalun Valley Region, NTB sebagai juaranya.

Selain itu, indikator keberhasilan pengembangan pariwisata di NTB adalah jumlah kunjungan wisatawan. Pada periode 2015—2016 target mendatangkan 2 juta orang wisatawan dapat dipenuhi. Kemudian periode

Vol.13 No.1 Agustus 2018



2016—2017 target ditingkatkan menjadi 3 juta orang wisatawan juga dapat dilampaui dan untuk periode sekarang 2018—2019 dengan target 4 juta orang wisatawan juga dirasakan optimis untuk dapat dicapai. Hal ini juga dalam rangka membantu pemerintah pusat untuk merealisasikan target nasional yang ingin mendatangkan 20 juta orang wisatawan pada tahun 2020.

Dari berbagai prestasi dan keberhasilan yang telah diraih pariwisata NTB sebenarnya tidak lepas dari dukungan *stakeholder*, termasuk masyarakat lokal di destinasi. Masyarakat lokal memainkan peran yang penting dalam menyukseskan pengembangan pariwisata halal. Selain juga kebijakan dan komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam hal ini, Gubernur Propinsi NTB yang aktif mengkampanyekan wisata halal dalam setiap kesempatan baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, dukungan kuat juga berasal dari peran media yang aktif menyebarkan informasi wisata halal dalam berbagai *channel* komunikasi. Hasilnya memang signifikan dengan usaha yang telah dilakukan.

Namun demikian, tidak berarti bahwa di balik keberhasilan yang telah diraih, permasalahan yang berkaitan dengan wisata halal secara otomatis dapat diselesaikan. Faktanya, banyak hal yang harus dibenahi dalam mengembangkan pariwisata halal khususnya yang berkaitan dengan dampak sosial dan budaya masyarakat NTB khususnya di Pulau Lombok. Misalnya, jaminan tentang kehalalan produk dan pelayanan pariwisata, keberterimaan konsep halal oleh masyarakat atau penduduk lokal yang non-muslim, dan dampak sosial-budaya pengembangan wisata halal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat NTB khususnya di Pulau Lombok.

Banyak pihak mengklaim bahwa sosialisasi wisata halal di masyarakat sangat minim, hanya komponen masyarakat pariwisata dan lapisan masyarakat berpendidikan saja yang mengetahuinya. Sementara yang lainnya, belum dan bahkan tidak tahu sama sekali. Jelas

hal ini dapat menjadi kendala dan ancaman dalam pengembangannya. Untuk itu, dampak sosial dan budaya pengembangan wisata halal menjadi penting untuk dianalisis secara lebih mendalam agar akar permasalahannya dapat ditemukan. Dengan demikian, solusi ataupun rekomendasi nantinya dapat didesain. Konteks inilah yang mendasari kajian makalah ini.

Untuk mendalami dampak sosial, terdapat 11 indikator yang dijadikan sebagai unit analisisnya (Ap and Crompton, 1998; Hampton, 1998; Scheyvens, 2002; Speed, 2008) sedangkan dampak budaya, terdapat 12 elemen yang menjadi atributnya (Ritchie dan Zins, 1978:257). Dampak sosial pengembangan pariwisata, dengan berbagai bentuk produk (wisata massal, alternative, bahari, budaya, dll) adalah: (1) nilai agama pada masyarakat lokal; (2) penggunaan minuman beralkohol; (3) rasa hormat anak-anak (muda) kepada orang tua; (4) konflik sosial; (5) kriminalitas; (6) nilai dan keutuhan keluarga; (7) prostitusi; (8) penggunaan obat-obatan terlarang; (9) tindakan seksual; (10) interaksi antara penduduk asli dan wisatawan; dan (11) keinginan mempelajari bahasa diantara penduduk lokal.

Untuk mendalami dampak budaya dalam pengembangan pariwisata halal di NTB, elemen budaya yang diadopsi sekaligus menjadi indikatornya adalah: (1) kerajinan tangan; (2) bahasa; (3) tradisi; (4) seni dan musik (pertunjukan, lukis, pahat); (5) peninggalan sejarah; (6) jenis pekerjaan; (7) teknologi; (8) gaya arsitektur tertentu; (9) agama dan manifestasinya; (10) sistem pendidikan; (11) pakaian; dan (12) aktifitas liburan. Dengan demikian, fokus dari kajian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis kedua dampak tersebut dengan mendasarkan pada indikator dan elemennya masing-masing.

LANDASAN TEORI

Pendekatan yang digunakan pada makalah ini adalah *qualitative approach*. Pendekatan ini dianggap paling tepat untuk memahami dan mendalami berbagai fenomena pariwisata (Jennings, 2001) khususnya yang

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



berkaitan dengan dampak sosial dan budaya pengembangan pariwisata halal sebagai salah satu bentuk dari produk wisata alternative atau wisata minat khusus. Berbagai hasil kajian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji, dianalisis dan disintesis untuk mengetahui posisi kajian yang dilaksanakan.

Teori yang digunakan untuk membedakan permasalahan dampak sosial dan budaya yang sesuai adalah teori pertukaran sosial (*social exchange theory/SET*) yang diperkenalkan pertama kali oleh Emerson pada tahun 1962. Lebih lanjut SET dikembangkan dan diperluas bidang kajiannya oleh banyak ahli. Teori ini banyak digunakan untuk menganalisis pertukaran ketika interaksi terjadi antara tuan rumah dan wisatawan (Ap,1992). Pendekatan lain yang digunakan adalah, Soontayatron (2013) yang merangkum tipologi penduduk lokal menurut SET terdapat 4 bentuk hubungan: (1) *extensive contact*; (2) *partial contact*; (3) *neutral concerned with tourism*; dan (4) *no contact with tourism*; penduduk lokal yang tidak memiliki hubungan dengan wisatawan atau hanya melihat wisatawan ketika mereka lewat.

Analisis data dilakukan dengan teknik *domain analysis* yaitu dengan menganalisis bahasa dan istilah-istilah yang muncul dalam konteks interaksi budaya dan menggabungkan hasil analisis dengan istilah yang dihasilkan oleh peneliti. Teknik analisis berikutnya adalah *content analysis*. Analisis isi dapat dimulai dari semantik (tanda menurut maknanya, seberapa sering objek tertentu (orang, benda, kelompok, atau konsep) dirujuk, kemudian karakterisasi terhadap objek tertentu yang dirujuk (referensi ketidakjujuran, penipuan, dll), dan isi pesan melalui sifat psikofisik dari tanda (kata cantik, kata tampan, dll) (Jennings, 2001).

Kajian tentang pariwisata halal sekarang ini menjadi salah satu topic penelitian yang relatif baru. Ketersediaan literature pun masih sangat terbatas apalagi yang langsung meneliti tentang dampak sosial dan budaya pengembangan pariwisata halal. Namun demikian, tersedia juga hasil kajian yang

dianggap relevan dari beberapa ahli dengan topik kajian pada makalah ini, seperti. Farahani, H.Z., dan Henderson, J.C (2010: 79—89) yang mengkaji tentang “*Islamic Tourism and Managing Tourism Development in Islamic Societies: The Case of Iran and Saudi Arabia*”, Jaelani, A (2017) meneliti tentang potensi dan prospek wisata halal di Indonesia, El-Gohary Hatem (2016:124—130) dalam artikelnya “*Halal tourism, is it really Halal?*”, Mohsin, A., et al., (2016:137—143) mengkaji tentang peluang wisata halal dengan menumbuhkan kesadaran dari *stakeholder* pariwisata tentang perkembangan segmen pasar wisata halal, Battour, Mohamed dan Islamil, M.N., (2016:150—154) mendalami “*halal tourism: concepts, practices, challenges, and future*”, dan Samori, Z., et al., (2016:131—136) mengkaji tentang *trend* terkini pariwisata halal dengan mengambil kasus di beberapa Negara Asia.

Semua ahli hampir sama pandangannya tentang wisata halal bahwa produknya tidak hanya untuk wisatawan muslim tetapi juga untuk wisatawan non-muslim. Selain itu, mereka juga meyakini bahwa permasalahan utama yang dihadapi sekaligus sebagai tantangan dalam mengembangkan wisata halal adalah ketersediaan dan keberlanjutan (konsistensi) produk wisata, fasilitas, dan infrastruktur wisata halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Sosial Pengembangan Pariwisata Halal di Pulau Lombok

1. Nilai agama pada masyarakat lokal

Masyarakat Lombok terkenal sebagai masyarakat yang *religious* dan fanatik dengan kehidupan beragama khususnya Islam. Hal ini tercermin dari citra daerah sebagai “pulau seribu masjid”. Konteks pariwisata halal sekarang ini, menurut teori pertukaran sosial jelas akan memberikan dampak langsung dan positif terhadap penguatan nilai-nilai beragama di masyarakat. Tuan Guru sebagai representasi sosial masyarakat Lombok sudah pasti mempertimbangkan hikmah (*benefit*) dari



wisata halal tersebut. Selain itu, dapat dilihat juga keberadaan sekolah-sekolah agama mulai dari MI, MTs, dan MA yang pasti dapat ditemukan di seluruh kabupaten dan kota di Pulau Lombok dan bahkan jumlahnya melebihi sekolah umum setingkat SMP, dan SMA yang mencapai 50% kecuali untuk sekolah MI atau SD. Tabel 1.1 berikut adalah data tentang sekolah umum dan agama yang ada di Pulau Lombok.

Tabel 1. Data Sekolah Agama dan Umum di Pulau Lombok Tahun 2017

Kabupaten	Sekolah Agama			Sekolah Umum		
	MI	MTS	MA	SD	SMP	SMA
LOTENG	284	255	155	593	121	48
LOTIM	218	229	138	720	159	55
LOBAR	93	108	68	354	61	28
KLU	35	45	20	147	18	13
MATARAM	24	23	15	163	39	24
TOTAL	654	660	396	1.977	398	168

Sumber: BPS, NTB dalam Angka, 2017.

Dari tabel 1 di atas diketahui bahwa keberadaan sekolah agama di Pulau Lombok masih mendominasi sekolah umum kecuali untuk tingkat SD (1977) dan MI (654) persentasenya sekitar 33%, selanjutnya MTs (660) dan SMP (398) sekitar 60%, MA (396) dan SMA (168) sekitar 42%. Data ini memberikan pesan bahwa nilai agama yang dikhawatirkan akan luntur dengan sendirinya terbantahkan oleh fakta tentang keberadaan sekolah agama di Pulau Lombok. Dengan demikian, pengembangan pariwisata halal di Pulau Lombok dari lembaga pendidikan mendapat dukungan penuh. Artinya juga bahwa generasi SDM pariwisata halal setidaknya sudah tersedia.

Pada konteks lainnya, modal demografis pengembangan pariwisata halal di Pulau Lombok sesungguhnya sangat besar. Hal ini setidaknya menjadi indikasi awal bahwa wisata halal mendapat dukungan dari pemeluk agamanya khususnya Islam. Ini juga memperkuat bahwa wisata halal membawa dampak positif bagi pengembangan nilai agama pada sebagian besar penduduk Lombok yang mayoritas beragama Islam yakni 95.27% dari total penduduknya. Tabel 1.2 berikut memperlihatkan data penduduk berdasarkan agama yang dianut tahun 2017.

Tabel 2. Data Penduduk Berdasarkan Agama yang dianut di Pulau Lombok Tahun 2017

Kabupaten	ISLAM	HINDU	BUDHA	PROTESTAN	KATOLIK
LOTENG	895.061	5.610	115	208	306
LOTIM	1.170.829	1.205	2	183	234
LOBAR	551.818	39.580	2.456	335	353
KLU	338.900	70.272	7.680	12.397	6.239
MATARAM	126.139	1.058	22	1.083	1.756
TOTAL	3.046.747	117.725	10.275	14.206	8.888
TOTAL PEMELUK	3.197.841				
% DARI TOTAL PEMELUK	95,27%	3,68%	0,32%	0,44%	0,277%

Sumber: BPS, NTB dalam Angka, 2017.

Dengan demikian, nilai agama yang dikhawatirkan akan luntur, melemah, menurun, dan atau pun menghilang sepertinya sulit terjadi sebagai konsekuensi logis dari pengembangan wisata halal. Dengan kata lain bahwa teori SET dalam konteks ini diterapkan (*applied*) dan berjalan dengan baik (*well done*) dan dapat memperkuat nilai agama di masyarakat sebagai dampak sosial yang positif.

2. Penggunaan minuman beralkohol

Keberadaan minuman keras (mengandung alcohol) memang sudah ada sebelum pariwisata berkembang seperti sekarang ini. Dengan kata lain, dengan atau tanpa pariwisata kehadirannya tetap eksis. Salah satu dampak sosial yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah meningkatnya penggunaan minuman beralkohol tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa peranan minuman (*beverages*) dalam industry pariwisata khususnya sector perhotelan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan hotel yang bersumber dari divisi makanan dan minuman.

Pemandangan kontras yang terlihat dalam konteks pariwisata Lombok bahwa penjualan dan penggunaan minuman beralkohol sudah dilokalisasi. Diakui pula bahwa daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata sulit untuk mengurangi apalagi meniadakan keberadaan minuman beralkohol tersebut karena memang sudah melekat dengan budaya wisatawan. Perilaku wisatawan yang senang dengan minuman beralkohol dianggap wajar karena di negaranya suhu, musim, cuaca,



dan temperaturnya jauh berbeda dengan di negara-negara tropis, salah satunya seperti Indonesia. Alasan pembenaran ini sangat logis dan dapat diterima oleh semua kalangan, karena tujuan mereka adalah menghangatkan badan demi kesehatan.

Dampak kedatangan wisatawan (dengan perilaku) meminum-minuman keras di destinasi inilah yang kemudian ditiru oleh masyarakat (khususnya anak-anak muda) baik yang secara langsung bekerja di sector pariwisata maupun yang tidak (penduduk lokal). Dengan kata lain, *demonstration effect* telah mendatangkan dampak sosial negatif bagi penduduk lokal. Negatif dari perspektif agama tentunya. Kenyataannya, perilaku meminum-minuman keras tidak hanya terjadi di kawasan wisata dan perkotaan dan bahkan sekarang sudah merambah sampai ke desa. Fakta yang sering ditemukan bahwa setiap ada *gawe* (acara pernikahan) khususnya H-1 menjelang prosesi adat, biasanya tuan rumah selalu menyediakan minuman tradisional yang juga termasuk minuman memabukkan. Ini dilakukannya untuk menarik anak-anak muda supaya banyak yang terlibat dalam prosesi adat *nyongkolan*. Jadi, sudah ada semacam *stereotype* dari kalangan muda bahwa kalau tidak ada minuman, *gawenya* tidak ramai. Inilah yang kemudian timbul sebagai dampak sosial.

Kehadiran pariwisata halal di Pulau Lombok, mungkin salah satu nilai yang dapat ditemukan adalah untuk menurunkan tingkat penggunaan minuman beralkohol di kalangan generasi muda. Jika hal ini menjadi salah satu tujuan pengembangan wisata halal, maka diperlukan regulasi yang berkaitan dengan minuman beralkohol. Menjadi suatu kesalahan besar kalau langsung meniadakan minuman beralkohol dalam konteks pariwisata karena segmen penggunaannya khusus yaitu wisatawan non-muslim. Dengan kata lain bahwa hotel, bar, dan restaurant tetap diijinkan untuk menyediakan berbagai jenis minuman tergantung selera wisatawan. Aspek yang paling penting di sini adalah *demonstration effect* tersebut yang harus dijaga oleh

stakeholder pariwisata dan orang tua agar generasi muda tidak meniru perilaku negatif wisatawan.

Berdasarkan SET, sulit untuk menghilangkan kebiasaan minuman keras di masyarakat yang berada di destinasi wisata dan sekitarnya. Alasannya bahwa ada manfaat dari hasil pertukaran yang terjadi (interaksi wisatawan dengan penduduk lokal) kecuali untuk menguranginya mungkin dapat secara perlahan dengan mengintensifkan peran Tuan Guru dan tokoh adat dan masyarakat dalam mengedukasi generasi muda. Lebih jauh lagi, kalau landasan ideologis pengembangan wisata halal di Pulau Lombok adalah berbasiskan teokratik seperti di Iran dan Saudi Arabia, maka tidak ada alasan minuman beralkohol eksis di Pulau Lombok dan bahkan di Negara Indonesia. Dengan demikian, dampak sosial negatif dari pengembangan pariwisata halal masih tetap (belum mampu merubah) perilaku masyarakat khususnya generasi muda untuk berhenti meminum-minuman yang beralkohol.

i. Rasa hormat anak-anak (muda) kepada orang tua

Dampak sosial yang juga dikhawatirkan berikutnya adalah hilangnya rasa hormat (*respect*) anak kepada orang tuanya. Data dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Prop. NTB mencatat bahwa pada tahun 2016 terjadi 300 kasus yang dilakukan oleh anak-anak dan tahun 2017 masih tersisa 60 kasus. Sebagian besar kasus tersebut adalah pencurian dan kejahatan lainnya. Jika ini dijadikan sebagai salah satu indikator menurunnya rasa hormat anak-anak (*respect*) kepada orang tuanya cukup logis.

Pada sisi lainnya, animo orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke Pondok Pesantren juga tinggi. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada orang tua di desa tetapi juga orang tua di perkotaan dan bahkan tingkat kesadaran orang tua di kota untuk menyantrikan anaknya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan orang tua yang di desa. Dengan kata lain bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tua tersebut tujuannya tidak lain adalah memberikan pelajaran (pengetahuan, keterampilan, dan



sikap) kepada anak-anaknya tentang pentingnya nilai-nilai agama sebagai bekal hidup.

Dalam konteks ini, pariwisata halal yang dikembangkan pemerintah jika dipertemukan dengan data dari LPA maka dampak sosial positifnya belum dapat dirasakan. Di sinilah pentingnya sosialisasi berkelanjutan dari wisata halal tersebut. Misalnya, untuk saat ini salah satu program wisata halal yang setiap tahunnya dilaksanakan adalah Khasanah Ramadhan di Islamic Centre Mataram. Acara yang berlangsung selama sebulan penuh tersebut banyak memberikan nilai pembelajaran mulai dari bedah buku, pameran, lomba busana muslim, pemutaran film-film islami, kuliner, dan lain-lain kepada pengunjungnya yang sebagian besar segmennya adalah yang sudah berkeluarga (anak, bapak, dan ibu).

Berdasarkan fenomena tersebut, rasa hormat (*respect*) anak-anak kepada orang tua diyakini semakin kuat. Dengan kata lain bahwa dampak negatif (menurun atau menghilangnya rasa hormat anak-anak kepada orang tua) sebagai konsekuensi logis pengembangan pariwisata halal di Lombok tidak terjadi dan bahkan dapat mengurangi angka kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak seperti yang dirilis oleh LPA NTB, paling tidak dapat diturunkan.

ii. Konflik sosial

Pengembangan pariwisata halal di Pulau Lombok salah satu tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang aman dan damai. Tantangan pengembangan pariwisata tidak hanya wisata halal tetapi juga bentuk-bentuk pariwisata lainnya (konvensional/massal) adalah kerawanan atau konflik sosial. Konflik ini biasanya terjadi karena hal-hal sepele dan sifat awalnya individual, kemudian membesar menjadi konflik kelompok atau sosial. Secara *locus* kejadian, konflik ini biasanya terjadi antar-kampung baik di desa maupun di perkotaan.

Sebagai bukti, konflik sosial yang terjadi di Pulau Lombok pada tahun 2017

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana tahun 2016 terdapat sebanyak 172 konflik sosial dan tahun 2017 tersisa 26 kasus, 2 diantaranya terjadi di luar pulau Lombok sedangkan sisanya 24 kasus tampak seperti tabel 1.3 berikut. Secara umum, konflik sosial yang terjadi adalah perkelahian antar kampung yang penyebabnya adalah hal-hal sepele, sifatnya individual kemudian berkembang menjadi konflik sosial. Berikut adalah konflik sosial yang terjadi selama 2017.

Tabel 3 Frekuensi Konflik Sosial (Perkelahian Antar-Kampung) Di Pulau Lombok Tahun 2017

Kabupaten	Frekuensi Konflik
LOMBOK TENGAH	8
LOMBOK TIMUR	1
LOMBOK BARAT	5
LOMBOK UTARA	1
KOTA MATARAM	9
TOTAL	24

Sumber: BPS, NTB dalam Angka, 2017.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa konflik sosial (perkelahian antar-kampung) yang masih tinggi frekuensinya ada di Kota Mataram, kemudian Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Jika dilihat lebih mendalam, pelaku konfliknya sama saja (kampong yang bertikai) itu-itu saja, misalnya di Kota Mataram, pelakunya adalah Petemon melawan Karang Genteng, di Lombok Tengah, Ketare lawan Tanaq Awu, dan di Lombok Barat, Desa Perampuan (antar-dusun). Tentu, kejadian seperti ini tidak diharapkan terulang terus menerus.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi konflik sosial misalnya, di Kota Mataram kebijakannya dengan memindahkan bangunan atau kantor-kantor strategis di wilayah selatan seperti, Korem dan UIN yang lokasinya ada di tengah-tengah daerah konflik. Di Lombok Tengah, kebijakan strategisnya adalah ditetapkannya lokasi pembangunan Bandara Internasional Lombok di daerah konflik yakni Tanaq Awu



sedangkan di Lombok Barat kebijakannya adalah Polsek dan Koramil dibangun dalam satu jalur-jalan. Dampaknya memang konflik antar-kampung mereda dan bahkan sudah tidak terjadi lagi untuk sampai sekarang ini.

Harapannya dengan pengembangan pariwisata halal di Pulau Lombok, konflik-konflik sosial tersebut dapat berkurang dan bahkan menghilang. Sejauh ini memang kontribusi wisata halal dalam menciptakan suasana kondusif (menghilangkan konflik sosial) belum tampak. Namun demikian, dari *euphoria* dan program yang sudah dijalankan selama ini cukup menarik dan banyak memberikan edukasi bagi masyarakat tentang hidup rukun dan saling membantu.

iii. Kriminalitas

Pada tataran empiris, pengalaman wisatawan di Pulau Lombok seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan, bertentangan dengan fakta di destinasi. Dalam beberapa kasus, wisatawan mengalami gangguan keamanan perjalanan wisatanya. Berbagai kasus tindak kejahatan yang menimpa wisatawan telah mencoreng citra destinasi. Pada tahun 2015, setidaknya 30 kasus tindak kejahatan yang korbannya adalah wisatawan (Lombok Post, 30 Nop, 2015, Kol. 1—4). Dari *locus* kejadian, wisatawan mengalaminya tidak hanya di pantai, pesisir, jalan raya, gunung tapi juga terjadi di dalam angkutan umum.

Tentu kondisi seperti itu tidak diharapkan terjadi di destinasi wisata apalagi Pulau Lombok saat ini sedang memfokuskan pengembangan pariwisata halal. Konteks halal, selain merujuk pada hal-hal yang diperbolehkan secara Islam tetapi juga menyangkut hal-hal yang dapat diterima (sehat, tidak merugikan, memberikan manfaat lebih). Kondisi tidak aman saja sesungguhnya sudah dapat mengurangi makna dari pariwisata halal. Apalagi sampai terjadi perampokan, pembunuhan, penjabretan, dll. Untuk itu, kehadiran pariwisata halal diharapkan setidaknya dapat membawa implikasi praktis bagi terciptanya masyarakat yang kondusif dan mengurangi tindak kejahatan.

Kriminalitas tidak hanya berkaitan dengan kejahatan yang menimpa wisatawan tetapi semua hal yang berkaitan dengan tindakan yang melawan hukum, merugikan (material dan spiritual) dan bahkan menghilangkan nyawa seseorang. Di Pulau Lombok angka kriminalitas termasuk masih paling tinggi khususnya di wilayah Kota Mataram, kemudian Lombok Timur, Lombok Tengah, dan yang relatif aman adalah Kab. Lombok Utara dengan angka kejahatan paling rendah.

Data berikut merupakan rangkuman tindak kriminalitas dalam setahun. Pada tahun 2016 terjadi 9.231 kasus dan tahun 2017 menurun menjadi 8.511 kasus. Di mana 3.400 kasus terjadi di Pulau Lombok sedangkan sisanya di luar (Kab. Sumbawa Besar, Sumbawa Barat, Kab. Bima, Kab. Dompu, dan Kota Bima). Adapun rinciannya seperti terlihat pada tabel 1.4 berikut.

Tabel 4. Data Kriminalitas di Pulau Lombok Tahun 2017

Kabupaten	Kriminalitas
LOTENG	616
LOTIM	958
LOBAR	500
MATARAM	1326
TOTAL	3.400

Sumber: Republika.co.id.2017.

Dari tabel di atas diketahui bahwa angka kriminalitas di Pulau Lombok tergolong masih tinggi khususnya di Kota Mataram. Apabila data ini dikaitkan dengan program wisata halal maka muncul sebagai tantangan sekaligus ancaman dalam pengembangannya. Dalam hal ini, tokoh agama dan masyarakat memainkan peran penting dalam menyosialisasikan program wisata halal kepada masyarakat lokal agar kesadarannya dapat tumbuh.

Dampak sosial-positif dari wisata halal juga harus menasar aspek kritis seperti ini. Jika angka kriminalitas tidak dapat ditekan, maka program wisata halal dapat dikatakan gagal. Esensi halalnya tidak ditemukan ketika tindak kejahatan masih terjadi. Padahal



prasyarat untuk dapat mengembangkan pariwisata adalah terciptanya rasa aman. Dengan kata lain, sulit untuk mengatakan pariwisata halal yang telah sukses meraih berbagai penghargaan dunia, namun fakta kriminalitas belum dapat diselesaikan secara tuntas. Hal ini sangat berlawanan dengan prestasi dan ekspektasi pengembangan pariwisata halal.

iv. Nilai dan keutuhan keluarga

Dampak sosial berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah nilai dan keutuhan keluarga. Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur keutuhan keluarga adalah tingkat perceraian yang rendah. Ternyata, NTB menjadi propinsi yang paling tinggi dan bahkan Lotim peringkat ke-5 di Indonesia dengan angka perceraian tertinggi. Berdasarkan data dari BKKBN Prop. NTB tahun 2017, diketahui bahwa dari 4.821.875 kepala keluarga di NTB, sebanyak 308.973 orang (21,55%) statusnya sebagai janda atau duda. Angka ini tersebar di Lotim sebanyak 24,8%, Loteng (23,9%), Lobar (22%), KLU (20,8%), Kota Mataram (20,4%), Bima (18%), Dompu (16,8%), Sumbawa dan Sumbawa Barat (14,1%).

Data di atas memberikan gambaran bahwa tingkat perceraian yang tinggi banyak disebabkan karena faktor pernikahan pada usia dini, masalah ekonomi, dan pengangguran sehingga banyak warga yang menjadi tenaga kerja migrasi ke luar negeri. Artinya bahwa kehadiran pariwisata halal yang diharapkan dapat menciptakan dan menyediakan beberapa lapangan pekerjaan, dapat menjadi alternative solusi dari pengangguran yang ada di Pulau Lombok.

Dampak sosial ini memang sudah ada (*existing*) sebelumnya bukan muncul sebagai akibat pengembangan pariwisata halal. Keberadaan pariwisata halal sekarang ini adalah untuk mengeliminasi dampak-dampak negatif tersebut. Sesungguhnya banyak hal yang dapat dikreasi melalui wisata halal, misalnya kuliner, oleh-oleh, bisnis perjalanan wisata syariah atau religi, dan usaha wisata

lainnya. Jadi, kesenjangan yang muncul adalah peluang yang dibawa pariwisata halal belum dapat ditangkap oleh masyarakat lokal.

Dalam konteks ini, *stakeholders* pariwisata memainkan peran penting dalam menyosialisasikan peluang ekonomi pariwisata halal kepada masyarakat agar dapat terlibat aktif dalam berbagai aktifitas pariwisata. Jika hal ini dapat dilakukan maka diyakini dampak positif sosial pariwisata halal dalam mengurangi angka perceraian, pengangguran yang berujung pada keutuhan keluarga dapat diciptakan. Jadi, pariwisata halal dapat menjadi alat perekat keluarga. Dengan demikian, nilai ekonomi dan keharmonisan dari pariwisata halal dapat juga ditemukan.

v. Prostitusi, penggunaan obat-obatan terlarang, dan tindakan seksual

Dampak sosial yang sangat serius timbul tidak hanya sebagai akibat dari pengembangan pariwisata tetapi juga pengembangan industry lainnya di suatu daerah pasti menghadapi dan menemukan tiga lingkaran “setan” yang memiliki tingkat kasualitas tinggi yakni, prostitusi, tindakan seksual, dan penggunaan obat-obatan terlarang. Untuk mengidentifikasi lokasi, pelaku, dan motif ketiga ekse tersebut memang sangat sulit. Namun setidaknya, ekse yang ditimbulkan ketiganya dapat diketahui melalui akibat perbuatannya. Ketiga lingkaran “setan” tersebut berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Prop. NTB diketahui bahwa jumlah kasus HIV dan AIDS menunjukkan angka yang signifikan khususnya di tempat-tempat wisata dan hiburan (bar, café, dan karaoke) seperti tabel berikut.



Tabel 5 Jumlah Kasus HIV dan AIDS Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017

Kabupaten/ Kota		2017
1	Lombok Barat	215
2	Lombok Tengah	186
3	Lombok Timur	244
4	Sumbawa	62
5	Dompu	15
6	Bima	70
7	Sumbawa Barat	58
8	Lombok Utara	35
9	Kota Mataram	503
10	Kota Bima	42
NTB		1.430

Sumber: KPA NTB, 2017.

Data di atas memberikan informasi penting bahwa kasus HIV dan AIDS kejadiannya tidak mengenal tempat dan situasi. Pulau Lombok yang terkenal dengan julukan *pulau sebagai seribu masjid* pun juga kena imbasnya. Tantangan dan sekaligus ancaman bagi pengembangan pariwisata halal di NTB khususnya Lombok juga ada pada masalah ini. Bahkan trennya meningkat. Berdasarkan data dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) NTB, tahun 2015 menemukan 1.083 orang teridentifikasi HIV/AIDS, tahun 2016 menjadi 1.235 orang dan bertambah lagi menjadi 1.430 orang tahun 2017. Penyebabnya adalah gonta-ganti pasangan, homoseksual, dan penularan lewat jarum suntik obat-obatan terlarang.

Asumsi yang dapat dikembangkan dengan mendasarkan pada data di atas bahwa pemerintah Propinsi gencar mengkampanyekan pariwisata halal mungkin alasan mendasarnya adalah untuk mengurangi dan mengeliminasi data dan fakta kasus HIV/AIDS yang terus bertambah ini. Jika ini sebagai tujuan akhirnya, maka pariwisata halal memang menjadi pilihan yang tepat untuk mengedukasi masyarakat agar

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

hidup sehat terutama melarang perilaku seks bebas. Dampak sosial positif dari pengembangan pariwisata halal memang secara langsung tidak dapat diukur namun secara bertahap berawal dari dampak yang sudah ada, nantinya dapat diketahui. Jika angka-angka tersebut menunjukkan adanya penurunan maka dapat dibenarkan program wisata halal berhasil namun sebaliknya ketika angka-angka tersebut terus meningkat, maka kegagalan juga dapat dikaitkan dengan pariwisata halal.

vi. Interaksi antara penduduk asli dan wisatawan

Dampak sosial pengembangan wisata halal lainnya adalah interaksi penduduk asli dengan wisatawan. Untuk mengetahui sejauhmana interaksi keduanya, 4 tipologi hubungan penduduk lokal: (1) *extensive contact*; (2) *partial contact*; (3) *neutral concerned with tourism*; (4) *no contact with tourism* (Soontayatron, 2013) dielaborasi dalam kajian ini.

Interaksi pertama, hubungan ekstensif dimana penduduk lokal memiliki hubungan langsung dengan wisatawan dan sangat tergantung dengan pariwisata. Mereka mungkin menjadi penganggur jika tidak ada pariwisata. Hal ini terlihat jelas di destinasi-destinasi seperti Senggigi, Pantai Kuta, Kota Mataram, Gili Trawangan, dan destinasi wisata lainnya dimana masyarakat sebagai penjual oleh-oleh (*souvenir*) mengadakan kontak ekstensif dan regular dengan wisatawan melalui dagangannya.

Interaksi kedua, kontak parsial. Penduduk lokal memiliki hubungan regular dengan wisatawan, namun mereka juga tidak menolak bekerja di pariwisata. Kondisi ini dapat dilihat pada masyarakat yang membuka usaha jasa penyewaan kendaraan (mobil/sepeda motor) bagi wisatawan, sebagai sopir angkutan wisata, membuka usaha kuliner (rumah makan), *homestay*, dan usaha jasa lainnya yang kontakannya dengan wisatawan tidak penuh-langsung (parsial).

Interaksi ketiga, kontak netral. Penduduk lokal memiliki hubungan secara



tidak langsung dengan wisatawan dan hanya menerima sebagian pendapatannya berasal dari pariwisata. Kondisi ini juga dapat dilihat dimana masyarakat yang memiliki property disewakan untuk kepentingan wisatawan, misalnya lahan, bangunan atau rumah untuk hotel sedangkan hubungan terakhir adalah tidak ada kontak dengan wisatawan, di mana penduduk lokal tidak memiliki hubungan dengan wisatawan atau hanya melihat wisatawan ketika mereka lewat. Kondisi ini juga ditemukan biasanya di tempat-tempat yang berjauhan dengan destinasi.

Dengan demikian, keempat tipologi interaksi tersebut dalam konteks wisata halal di Pulau Lombok semuanya dapat ditemukan dengan motif ada manfaat yang didapatkan sebagai konsekuensi logis dari pertukaran yang dilakukan dengan wisatawan. Dengan kata lain, teori pertukaran sosial (*social exchange theory*) berlaku dalam konteks pariwisata halal.

vii. Keinginan mempelajari bahasa diantara penduduk lokal

Berkembangnya pariwisata halal di NTB khususnya Pulau Lombok, semestinya dibarengi dengan animo masyarakat untuk belajar bahasa arab. Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Prop. NTB juga dapat dikatakan terlambat dalam merespon kebutuhan pemandu wisata halal. Saat ini, pemandu wisata berbahasa arab yang sudah ada baru 15 orang (2017), dan akan dilatih lagi 50 orang (2018). Keseluruhan pemandu wisata NTB berjumlah 700 orang yang dibagi ke dalam enam bahasa pemanduan (Inggris, Jerman, Perancis, Rusia, Belanda, Mandarin, dan Jepang).

Kondisi ini tentu memperhatikan karena pada level *stakeholder* yang terdekat saja belum menunjukkan kesiapan matang dalam menyambut wisata halal dari sisi bahasa apalagi pada level masyarakat. Namun demikian, persediaan sumber daya manusia yang siap pakai untuk menjadi pemandu wisata syariah sesungguhnya banyak dapat ditemukan langsung di Ponpes-Ponpes yang ada di Pulau Lombok dan beberapa perguruan tinggi yang

membuka bahasa arab, seperti UIN Mataram dan UNW Mataram.

Animo untuk mempelajari bahasa arab di masyarakat cukup tinggi. Indikator yang dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk mengukurnya adalah banyaknya Ponpes yang ada di Pulau Lombok dan hampir dapat dipastikan bahwa bahasa arab menjadi pelajaran wajib dan utama di sekolah ini. Tabel 6 menampilkan data Ponpes.

Tabel 6. Ponpes di Pulau Lombok Tahun 2017.

Kabupaten	Jumlah Ponpes
LOTENG	154
LOTIM	170
LOBAR	69
KLU	23
MATARAM	13
TOTAL	429

Sumber: BPS, NTB dalam Angka, 2017.

Dari tabel 1.6 di atas dapat diketahui bahwa modal SDM (pemandu wisata) berbahasa arab sesungguhnya sudah tersedia, tinggal dijalin kerjasama yang intensif antara *stakeholder* terkait dengan Ponpes. Dalam hal ini, peran HPI sangat vital dalam memamatkan SDM yang sudah ada untuk dilatih teknik pemanduan wisata. Jika ini dapat dimanfaatkan oleh *stakeholder* pariwisata maka dampak sosial positif dari wisata halal yang nyata dapat ditemukan. Untuk itu, inisiasi dari pemangku kepentingan, misalnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB mengajak HPI untuk terjun langsung dalam merekrut SDM pemandu wisata berkualitas dengan menyeleksi calon di 429 Ponpes sudah sangat memadai untuk kebutuhan pemandu berbahasa arab.

Dengan demikian, dari 11 dampak sosial yang ada sebagai akibat pengembangan dari pariwisata halal di Pulau Lombok, maka 8 dampak memang sudah ada sebelumnya (*existing impacts*) (penggunaan minuman beralkohol; rasa hormat anak-anak (muda) kepada orang tua; konflik sosial; kriminalitas; nilai dan keutuhan keluarga; prostitusi; penggunaan obat-obatan terlarang; dan

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems



tindakan seksual) sebagai tantangan sekaligus ancaman bagi pengembangan wisata halal di Pulau Lombok sedangkan 3 dampak yang menjadi penguat sekaligus pendukung keberhasilan wisata halal yaitu: (1) menguatnya nilai agama pada masyarakat lokal; (2) terjalannya kontak atau interaksi antara penduduk asli dan wisatawan; dan (3) adanya keinginan mempelajari bahasa diantara penduduk lokal secara alami melalui Ponpes yang ada.

Dampak Budaya Pengembangan Pariwisata Halal di Pulau Lombok

Untuk mendalami dampak budaya dalam pengembangan pariwisata halal di NTB, elemen budaya yang diadopsi sekaligus menjadi indikatornya adalah: (1) kerajinan tangan; (2) bahasa; (3) tradisi; (4) seni dan musik (pertunjukan, lukis, pahat); (5) peninggalan sejarah; (6) jenis pekerjaan; (7) teknologi; (8) gaya arsitektur tertentu; (9) agama dan manifestasinya; (10) sistem pendidikan; (11) pakaian; dan (12) aktifitas liburan.

Kerajinan tangan yang muncul sebagai dampak budaya pengembangan wisata halal sampai saat ini belum dapat dilihat bentuk dan modelnya. Misalnya, motif pada kain atau kaos yang mencerminkan *icon-icon* halal (bangunan Islamic Centre, gambar-gambar masjid, tempat-tempat ziarah (maqam), dll. Ini sebenarnya adalah peluang ekonomi yang belum digarap maksimal. Belum lagi, tas, sepatu, gantungan kunci, dan masih banyak bentuk kerajinan tangan dengan memunculkan icon halal sebagai *brand* (mereknnya).

Dampak atau eksekusi berarti muncul setelah sesuatu itu, dalam hal ini wisata halal dikembangkan, namun sudah tiga tahun berlalu, industri kerajinan tangan yang mencirikan nuansa halal belum terlihat sampai sekarang ini. Kerajinan tangan yang sudah ada adalah hasil-hasil yang labelnya adalah *icon-icon* pariwisata konvensional. Dengan kata lain, wisata halal belum memberikan dampak positif yang signifikan terhadap industri kerajinan tangan.

Sama halnya dengan bahasa, seperti yang telah dijelaskan pada dampak sosial di atas bahwa bahasa arab masih belum massif dipelajari oleh masyarakat lokal, yang dapat ditemukan hanya ada di Ponpes dan lembaga atau PT yang memang berbasiskan pendidikan agama (UIN dan UNW Mataram). Kasusnya hampir sama dengan elemen budaya (kerajinan tangan) sampai saat ini, geliat masyarakat lokal mempelajari bahasa arab belum terlihat. Hanya komponen-komponen yang terlibat langsung dengan aktifitas wisata saja yang memiliki kesadaran untuk belajar bahasa sedangkan yang lain belum terjadi perubahan yang signifikan. Artinya bahwa dampak wisata halal dalam bidang bahasa juga belum tampak.

Elemen budaya berikutnya adalah tradisi (kebiasaan yang turun-temurun dari leluhur). Konteksnya dengan wisata halal, tradisi halal sekarang ini sudah mulai dihidupkan oleh pemerintah melalui berbagai aktifitas misalnya selama bulan Ramadhan ini, Program Khasanah Ramadhan adalah salah satu bukti untuk membiasakan (tradisi) agar acara-acara bernuansa islam setiap bulannya tetap dilaksanakan sehingga tumbuh menjadi sebuah tradisi. Dampak wisata halal dalam konteks penciptaan tradisi sudah terbangun dengan baik. Namun perlu diekstensifkan tidak hanya di bulan Ramadhan tetapi juga pada bulan-bulan lainnya.

Dampak budaya pengembangan pariwisata halal berikutnya adalah seni dan musik (pertunjukan, lukis, pahat). Untuk sementara waktu, seni dan musik yang bernuansakan halal (islami) secara khusus memang belum ada. Namun, atmosfer suasana sudah dapat diciptakan melalui seni dan music misalnya music kedatangan di Bandara Internasional Lombok yang nuansanya dapat mewakili bahwa wisatawan sudah berada di destinasi halal. Seni lukis, pahat dan pertunjukkan juga demikian, masih sporadis kemunculannya dalam wisata halal, belum dapat dipersiapkan secara massal. Sebenarnya ini peluang usaha semua, tinggal direspon dengan upaya-upaya serius agar dapat menjadi



usaha nyata yang mendatangkan dampak ekonomi bagi pelakunya. Selain juga melestarikan nilai-nilai seni yang ada.

Dampak berikutnya, peninggalan sejarah. Wisata peninggalan ziarah khususnya di Kota Mataram memiliki banyak tempat yang mencirikan sebagai destinasi wisata religi misalnya, Maqam Loang Baloq, Maqam Saleh Sungkar, Maqam Batu Layar, Maqam Majeluw, dll. Namun tempat-tempat tersebut kurang mendapat ekspos ke media sosial dan promosi yang proporsional. Akibatnya, wisatawan domestik lebih dominan sebagai pengunjungnya dari pada wisatawan mancanegara. Hal ini menjadi tantangan pengembangan wisata halal dengan basis peninggalan sejarah untuk mengekspose secara maksimal agar dapat dikenal luas oleh wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Dampak budaya lainnya adalah jenis pekerjaan, teknologi, dan gaya arsitektur tertentu. Untuk jenis pekerjaan yang langsung berkaitan dengan wisata halal, misalnya menjadi pemandu wisata berbahasa arab dan penerjemah bahasa arab memang belum tampak. Teknologi dan gaya arsitektur tertentu yang sudah mulai dapat dilihat yakni bangunan Islamic Centre Mataram. Bangunan ini sekarang telah dijadikan sebagai *icon* wisata halal di NTB. Berbagai aktifitas keagamaan juga sering dilaksanakan di tempat ini (ceramah, bedah buku, baca kitab kuning, tafsir al-qur'an, sholat berjamaah, tabliq akbar, taddarus, dll). Dengan kata lain, Islamic Centre telah hadir tidak hanya sebagai icon wisata halal saja namun juga sebagai bentuk manifestasi aktifitas keagamaan, aktifitas liburan, dan bahkan pendidikan dan pengajaran menyatu di Islamic Centre.

Dampak budaya lainnya adalah sistem pendidikan, pakaian, dan aktifitas liburan. Pengembangan wisata halal di Pulau Lombok dampaknya mulai dirasakan di institusi-institusi pendidikan baik yang menengah, atas, lanjut maupun tinggi yang berusaha menciptakan suasana halal (*halal atmospheric*) baik dari aspek fisik maupun spiritual.

Misalnya, setiap Jumat pagi diadakan Imtaq sebelum PBM dimulai, dengan busana muslim, dan ceramah. *Atmospheric halal* benar-benar diciptakan di sekolah-sekolah umum. Suasana wisata halal juga tampak melalui kurikulum yang mengajarkan bahasa arab di sekolah umum.

Pakaian dan aktifitas liburan yang diharapkan mencerminkan adanya atmosfer halal secara alami memang telah terbentuk dengan sendirinya. Ciri khas pakaian masyarakat Lombok adalah menggunakan sarung (baik untuk laki-laki maupun perempuan). Kategori pakaian (busana) halal dengan sarung memang belum ada kesepakatan halal dari MUI. Namun secara kultur, sarung dapat dinilai sebagai pakaian yang menutup aurat. Jika ini yang menjadi salah satu indikator halalnya maka sarung tentu pakaian atau busana halal.

Terakhir adalah aktifitas liburan. Kategori liburan halal (jalan-jalan, makan-makan, dan lainnya) yang halal seperti apa? Elemen budaya yang ini juga belum ada indikator yang jelas sebagai bentuk atau formatnya. Dampak pengembangan wisata halal pada aspek budaya dengan elemen aktifitas liburan sejauh ini berjalan secara alami, belum dapat dinilai halal atau tidaknya karena memang indikator liburan halal masih belum ditetapkan. Dengan demikian, wisata halal pada aspek liburan juga menjadi tantangan lainnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang dampak sosial dan budaya pengembangan wisata halal di Pulau Lombok dengan menggunakan indikator masing-masing bidang berdasarkan hasil elaborasi dengan kajian-kajian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa dampak sosial dengan 11 indikator, maka 8 *existing impacts* atau dampak yang memang sudah ada sebelumnya (penggunaan minuman beralkohol; rasa hormat anak-anak kepada orang tua; konflik sosial; kriminalitas; nilai dan keutuhan keluarga;

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems



prostitusi; penggunaan obat-obatan terlarang; dan tindakan seksual) muncul sebagai tantangan sekaligus ancaman bagi pengembangan wisata halal di Pulau Lombok.

Tiga dampak yang menjadi penguat sekaligus pendukung keberhasilan wisata halal yaitu: (1) menguatnya nilai agama pada masyarakat lokal; (2) terjalannya kontak atau interaksi antara penduduk asli dan wisatawan; dan (3) adanya keinginan yang kuat mempelajari bahasa arab diantara penduduk lokal secara alami sedangkan dampak budaya dengan 12 indikator yang sudah tampak sebagai dampak positifnya adalah maka 3 elemen budaya yang terbukti memberikan dukungan terhadap wisata budaya adalah peninggalan sejarah, gaya arsitektur tertentu, agama dan manifestasinya sedangkan elemen kerajinan tangan, bahasa, tradisi, seni dan musik (pertunjukan, lukis, pahat), jenis pekerjaan, teknologi, sistem pendidikan, pakaian dan aktifitas liburan masih menjadi peluang dan tantangan bagi pengembangan pariwisata halal di Pulau Lombok.

Saran

Dari kesimpulan tersebut, saran yang disampaikan penulis agar pengembangan pariwisata halal di Pulau Lombok dapat berkelanjutan adalah:

1. Sosialisasi secara massif melalui semua media yang ada (baik cetak maupun elektronik) langsung maupun tak langsung sehingga semua lapisan masyarakat memahami kondisi pengembangan wisata halal.
2. Dampak sosial dan budaya yang positif dan belum tersentuh harus dikondisikan dengan menerapkan konsep *halal atmospheric* (menciptakan suasana fisik dan mental yang selalu bernuansa halal) di setiap destinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anonym, 2017. NTB dalam Angka 2017. Mataram. BPS Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- [2] Anonym, 2017. BKKBN NTB. Mataram. BKKBN Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- [3] Anonym, 2017. KPA NTB. Mataram. Komisi Penanggulangan Aids, Prop. NTB.
- [4] Anonym, 2017. LPA NTB. Mataram. Lembaga Perlindungan Anak. Prop. NTB.
- [5] Battour, M, and Ismail, M.N. 2016. Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future. *Journal of Tourism Management Perspectives*. Vol.19, Part B, (150-154).
- [6] Farahani, H. Z and Henderson, J.C. 2010. Islamic Tourism and Managing Tourism Development in Islamic Societies: The Case of Iran and Saudi Arabia. *International Journal of Tourism Research*, 12, 79—89.
- [7] El-Gohary, H. 2016. Halal tourism, is it really Halal?. *Journal of Tourism Management Perspectives*. Vol. 19, Part B, (124-130).
- [8] Jaelani, A. 2017. Industry Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek. MPRA Paper No. 76237. Available at: <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76237>
- [9] May, Abdurrahman. 2006. "Persepsi dan Sikap Tokoh Agama terhadap Eksistensi Pariwisata di Kab. Lombok Barat" (*tesis*). Denpasar: Program Magister Kajian Budaya. Universitas Udayana.
- [10] Mohsin, A., et al., 2016. Halal tourism: Emerging opportunities. *Journal of Tourism Management Perspectives*. Vol. 19, Part B, (137-143).
- [11] Sroyetch, Supattra. 2016. The Mutual Gaze: Host and Guest perceptions of socio-cultural impacts of backpacker tourism: A case study of the Yasawa Islands, Fiji. *Journal of Marine and Island Cultures*. Vol.5, 133-144.
- [12] Soontayatron , Somruthai, 2013. Thai Interpretation of Socio-Cultural Impacts of Tourism Development in Beach Resort. *American Journal of Tourism Management*, Vol.3 No.2, 29—35.
- [13] Sandeep, K and Vinod, K. 2014. Perception of Socio-Culture Impacts of Tourism: A Sociological Review.



International Research Journal of Social
Science. Vol.3(2), 40—43.

- [14] Ritchie, J., and Zins, M. 1978. Culture as a
determinant of the attractiveness of a
tourist region. *Annals of Tourism
Research*.5.2. (52—67).
- [15] Samori, Z. N., et al., 2016. Current trends
on Halal tourism: Cases on selected Asian
countries. *Journal of
Tourism Management Perspectives*. Vol.
1, Part B, (131-136).